

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

Khairunnisa Indriati

NPP 30.1032

Asdaf Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan

Program Studi Kebijakan Publik

Email: khairunnisaindriati27@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Meliasta Hapri Tarigan, AP., M. Si

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Increasing waste production along with many human activities, lack of awareness and community support in implementing waste management policies and waste management facilities that have not met needs. **Purpose:** This research was conducted to determine the implementation of waste management policies by the Banjarbaru City Environmental Office, supporting and inhibiting factors and efforts of the Banjarbaru City Environmental Office in overcoming obstacles to waste management in Banjarbaru City. **Method:** This research uses descriptive qualitative method with inductive approach. Data collection by interviews, observation and documentation. Data analysis by data reduction, data presentation and conclusions. **Results:** The Banjarbaru City Environmental Office has maximized waste management but is still not optimal, marked by indicators according to Edward III, namely Communication, Resources, Disposition and Bureaucratic Structure that have not been met. **Conclusion:** The implementation of waste management policy by the Hiudp Environmental Office of Banjarbaru City internally has been going well. However, it is constrained by community support and still unfulfilled facilities needed to manage waste in Banjarbaru City.

Keywords: Implementation, Policy, Management, Waste

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang(GAP): Meningkatnya produksi sampah seiring banyaknya aktivitas manusia, kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah dan fasilitas pengelolaan sampah yang belum memenuhi kebutuhan. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, faktor pendukung dan penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam mengatasi hambatan pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah memaksimalkan pengelolaan sampah namun masih belum optimal ditandai dengan indikator menurut Edward III yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi yang belum terpenuhi. **Kesimpulan:** Pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru secara internal telah berjalan baik. Namun, terkendala pada dukungan masyarakat dan masih belum terpenuhinya fasilitas yang dibutuhkan untuk mengelola sampah di Kota Banjarbaru.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Pengelolaan, Sampah



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah, ragam, dan jenis sampah meningkat akibat dari penambahan penduduk dan pola konsumsi masyarakat yang terus berkembang. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 1 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah hasil sampingan material dari kegiatan manusia sehari-hari atau dapat juga dari proses alam. Populasi penduduk yang kian bertambah setiap tahunnya membuat keperluan terhadap barang pokok seperti sandang dan pangan semakin meningkat. Dampak dari meningkatnya aktivitas manusia menyebabkan lebih banyak sampah yang dihasilkan. Meningkatnya jumlah sampah dan kurangnya sistem pengelolaan sampah yang efektif mengakibatkan penurunan lingkungan fisik dan sosial masyarakat.

Maraknya permasalahan sampah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pengelolaan sampah di daerahnya. Hal itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 12 ayat (2) terdapat Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya disebutkan lingkungan hidup. Dengan begitu pemerintah daerah menjadikan pengelolaan sampah sebagai bagian dari perwujudan mengurus lingkungan hidup agar tetap nyaman dan sehat sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 huruf H ayat (1) menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk sejahtera lahir dan batin, memiliki tempat tinggal, memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Praktik pengelolaan sampah di setiap daerah tentu berbeda beda. Salah satunya kota Banjarbaru yang memiliki jumlah timbulan sampah tergolong tinggi dan kian meningkat tiap tahunnya.

Tabel 1.

Jumlah Timbulan Sampah Kota Banjarbaru Tahun 2020-2022

Tahun	Timbulan Sampah (Ton)
2020	147,12
2021	164,71
2022	183,78

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, 2022

Meningkatnya jumlah timbulan sampah di Kota Banjarbaru tentu mejadi tantangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang memiliki tugas dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolan sampah di Kota Banjarbaru.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Permasalahan paling mendasar dan menjadi salah satu masalah di Kota Banjarbaru ialah kurangnya kesadaran masyarakat sebagai penghasil sampah untuk membuang sampah pada tempat yang telah diperuntukan untuk membuang sampah. Kurangnya kesadaran masyarakat tentu menimbulkan permasalahan permasalahan lainnya dalam mengelola sampah yaitu kesulitan pengumpulan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Permasalahan yang kedua ialah karena pemerintah kota Banjarbaru belum memiliki lahan sendiri untuk tempat pembuangan sementara, permasalahan yang ketiga ialah masih kurangnya armada pengangkut sampah untuk mengangkut sampah harian yang dihasilkan Kota Banjarbaru.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berguna sebagai referensi penelitian. Penelitian sebelumnya ini memiliki topik yang sama yaitu implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian Mutiara Dian Prasasti yang berjudul *Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Perhubungan Bondowoso* (Prasasti, 2018) menemukan hasil penelitian bahwa pengelolaan sampah belum terlaksana secara optimal dengan faktor penghambat yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana prasarana. Penelitian Inshan Padillah yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi* (Padillah, 2019) menemukan hasil penelitian bahwa Pengelolaan sampah dinilai masih kurang optimal karena minimnya sarana atau prasarana yang tersedia kemudian juga dipicu oleh kurangnya kesadaran masyarakat.

Penelitian Ratna Arisandi, Hery Nariyah, Nursahidin yang berjudul *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon* (Ratna Arisandi dkk, 2019) hasil penelitian bahwa pengelolaan sampah yang dilakukan belum optimal dan perlu ditingkatkan lagi. Penelitian Cecep Cahya Supena dan Erlan Suwarlan yang berjudul *Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran* (Cecep & Erlan 2020) menemukan hasil penelitian bahwa Permasalahan yang terjadi disebabkan oleh sumber daya manusia dan anggarannya, bentuk upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah ialah dengan cara melakukan pengarahan dan memelihara fasilitas yang ada. Penelitian Tri Yudiato, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani yang berjudul *Implementasi dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora* (Tri Yudiarto dkk, 2021) menemukan hasil penelitian bahwa pengelolaan sampah telah berjalan baik dan memberikan kepuasan kepada masyarakat.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh peneliti terdahulu yakni melakukan penelitian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan

sampah secara keseluruhan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dengan indikator berbeda dengan penelitian sebelumnya menggunakan pendapat dari van meter van horn (Padillah, 2019), sedangkan penelitian ini menggunakan indikator dari Edward III.

1.5 Tujuan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, faktor pendukung dan penghambat serta upaya Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam mengatasi hambatan pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru.

II. METODE

Penulis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Edward III (1980) (dalam Tangkilisan, 2016) yang terdiri dari 4 (empat) dimensi yaitu: (1) Komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan dan konsistensi; (2) Sumber Daya dengan indikator staf, informasi, kewenangan dan fasilitas; (3) Disposisi dengan indikator sikap, birokrasi dan insentif; (4) Struktur Birokrasi dengan indikator standar operasional prosedur dan fragmentasi.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan induktif. Penulis menggunakan tahapan analisis data menurut Millen dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013:246) yaitu: (1) Reduksi Data dengan meringkas, memilah yang menjadi hal pokok, dan fokus pada hal yang penting; (2) Menyajikan data agar mudah dipahami dapat dalam bentuk tabel; (3) Menarik Kesimpulan yaitu memutuskan hasil dari data yang telah dikumpulkan saat penelitian.

Peneliti menentukan informan dengan teknik *purposive sampling* untuk internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang terdiri atas kepala dinas, kepala bidang persampahan dan limbah B3, penyuluh lingkungan hidup yang berjumlah 3 (tiga) orang. Selain itu teknik *snowball sampling* untuk pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah yang terdiri atas masyarakat Kota Banjarbaru, pemulung dan petugas sampah yang berjumlah 9 (sembilan), sehingga jumlah keseluruhan informal ialah 12 (dua belas) orang.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis meneliti dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru menggunakan dimensi dari teori Edward III yang terdiri atas Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun hasil pembahasan melalui penelitian yang telah dilakukan sebagai berikut:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANJARBARU

3.1 Komunikasi

Komunikasi adalah salah satu faktor yang sangat memengaruhi dalam organisasi. Informasi yang dihasilkan dengan komunikasi akan menentukan dampak baik atau buruknya yang akan terjadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Ada tiga hal utama yang memengaruhi proses komunikasi kebijakan yaitu transmisi, konsistensi dan kejelasan.

3.1.1 Transmisi

Transmisi dilihat dari bentuk kegiatan dan cara penyampaian yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu wawancara dan observasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melakukan rapat koordinasi untuk melihat pencapaian yang telah dilakukan di bidang persampahan, apakah kinerja sudah sesuai dengan strategi, program dan target yang ingin dicapai, kemudian menyampaikan informasi mengenai kebijakan pengelolaan sampah dengan media elektronik yaitu video agar mudah diakses dan dipahami dari berbagai kalangan.

3.1.2 Konsistensi

Komunikasi yang konsisten dapat dilihat dari komunikasi yang berkesinambungan dan berkesesuaian dengan tujuan kebijakan pengelolaan sampah yang ada di Kota Banjarbaru. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah melakukan komunikasi secara berkesinambungan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti bahwa adanya spanduk larangan membuang sampah sembarangan dan larangan membuang sampah di TPS liar namun belum maksimal karena belum mencapai kesesuaian komunikasi ditandai dengan belum adanya teguran tegas yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

3.1.3 Kejelasan

Dalam proses komunikasi diharuskan informasi yang disampaikan harus jelas agar dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah tepat dengan tujuan kebijakan tersebut. Dalam aspek kejelasan informasi dapat dilihat dari apakah informasi tersebut bisa dipahami dan bisa dilaksanakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan yaitu wawancara terhadap masyarakat bahwa masyarakat mengaku belum mengetahui kebijakan pengelolaan sampah dan belum bisa melakukan pengelolaan sampah secara khusus. Sehingga dalam hal ini kejelasan komunikasi belum tercapai.

3.2 Sumber Daya

Sumber daya termasuk faktor yang berpengaruh dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Apabila sumber daya yang dimiliki kurang memadai maka implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak akan terlaksana secara maksimal. Sumber daya meliputi staf, informasi, wewenang dan fasilitas yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru.

3.2.1 Staf

Tenaga kerja lapangan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup di bidang persampahan saat ini berjumlah 470, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2.

Kualifikasi Tim Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah
1	Pekerja Pengangkut Sampah	233
2	Pekerja Kebersihan Sampah di Pinggir Jalan	152
3	Pekerja PDU	39
4	Pekerja TPA	46
Total		470

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, 2022

Bedasarkan hasil wawancara bahwa jumlah 470 orang masih tergolong kurang untuk jumlah sampah yang dihasilkan Kota Banjarbaru, setidaknya diperlukan 650 orang untuk dapat memenuhi kebutuhan jumlah tenaga kerja agar mampu mengelola sampah dengan maksimal.

3.2.2 Informasi

Informasi merupakan indikator yang memengaruhi pelaksanaan suatu kebijakan karena dengan adanya informasi menentukan hal yang harus dilakukan dalam suatu kebijakan. Keberhasilan informasi dilihat dari perilaku pelaksana kebijakan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui wawancara bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah menyampaikan secara internal kepada para staf dan tenaga kerja di bidang persampahan sesuai dengan kebijakan kemudian bagian pusat daur ulang juga telah melakukan pengelolaan sampah dengan metode *composting* sehingga informasi yang disampaikan telah berhasil dan mampu mengelola sampah sesuai dengan kebijakan pengelolaan sampah yaitu pemanfaatan sampah.

3.2.3 Kewenangan

Sebuah kewenangan mempertegas dan memperjelas tugas dan fungsi dari pelaksana kebijakan terkait implementasi kebijakan kewenangan yang berjalan baik merupakan suatu legitimasi dari para pelaksana kebijakan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam menjalankan kewenangan sesuai dengan kebijakan yang berlaku yaitu berpedoman pada Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru menerangkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup sehingga peraturan walikota tersebut dijadikan sebagai pedoman dalam menjalankan

kewenangan dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

3.2.4 Fasilitas

Kebijakan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan /Kebersihan akan terlaksana dengan baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru jika didukung dengan fasilitas yang memadai. Fasilitas dilihat dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru. Berikut sarana dan prasarana yang dimiliki untuk mengelola sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru:

Tabel 3.

Fasilitas Sarana dan Prasarana Persampahan Kota Banjarbaru Tahun 2022

No.	Fasilitas	Jumlah	Kebutuhan
1.	Truk sampah Dump	17 unit	25 unit
2.	Truk Amrol	28 unit	35 unit
3.	Bak Kontainer	76 unit	100 unit
4.	TPS	99 unit	150 Unit
5.	TPS 3R	3 unit	20 unit
6.	PDU	2 unit	5 unit
7.	Alat berat	5 unit	7 unit
8.	TOSA	182 unit	190 unit
9.	TPA	14,3 ha	20 ha
10.	Sweeper	1unit	5 unit

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru, 2023

Berdasarkan data tersebut, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah masih tergolong kurang.

3.3 Disposisi

Dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru akan berjalan dengan baik jika sikap para pelaksana kebijakan memiliki respon dan dukungan yang positif, pengangkatan birokrasi yang tepat dan insentif.

3.3.1 Sikap Pelaksana

Sikap pelaksan dapat dilihat dari respon dan dukungan para pelaksana kebijakan. Respon dan dukungan dari internal Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah melaksanakan secara maksimal dalam aspek pengumpulan dan pengangkutan. Namun, dukungan dari masyarakat masih terbilang kurang karena masih didapati sampah diluar kotak TPS dan membuang diluar jam yang telah ditentukan.

3.3.2 Pengangkatan Birokrasi

Pengangkatan birokrasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dilakukan dengan tepat dan mengangkat orang yang terpercaya untuk menjadi pelaksana kebijakan terkait pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa untuk pengangkatan apartur sebagian besar dari Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarbaru dan untuk penetapan jabatan berdasarkan kompetensi, kualifikasi dan syarat yang sesuai dengan aturan ASN.

3.3.3 Insentif

Insentif memengaruhi dalam memaksimalkan pelaksanaan suatu kebijakan sebagai pendorong atau stimulus untuk pelaksana kebijakan dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan. Insentif ini bisa berupa dana insentif yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru atau Penghargaan yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru kepada pegawai atau masyarakat sebagai pelaksana kebijakan.

3.4 Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ialah salah satu aspek yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dari aspek struktur birokrasi dapat dilihat dari Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Fragmentasi.

3.4.1 Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur digunakan agar pelaksana kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dapat memanfaatkan waktu dan dapat menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan observasi peneliti telah sesuai dengan SOP yang telah ditentukan agar tidak terjadi kesalahan dan tumpang tindih tanggung jawab.

3.4.2 Fragmentasi

Fragmentasi merupakan pembagian kerja yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah. Pembagian Kerja didukung dengan adanya struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Struktur Organisasi yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru didasari dengan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru. Berdasarkan observasi peneliti, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sudah ditempel ditempat yang mudah terlihat oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

3.5 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru memiliki petunjuk teknis yang jelas dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah

Petunjuk teknis merupakan tata pelaksanaan teknis di lapangan yang digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Adapun teknis pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru sebagai berikut:

- a. Mengangkut sampah dari berbagai Tempat Pengurangan Sampah (TPS)
- b. Pemisahan sampah berdasarkan jenis sampah
- c. Mengolah Sampah di Pusat Daur Ulang
- d. Mengangkut Sampah ke Tempat Pemrosesan Akhir
- e. Daur Ulang Sampah bagi sampah yang bisa didaur ulang jika tidak bisa maka dilakukan proses *landfill*
- f. Pengolahan menjadi bahan baku dan barang baru bagi sampah yang telah di daur ulang, untuk dapat digunakan berulang-ulang

2. Memiliki staf yang ahli di bidangnya

Pegawai yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru memiliki keahlian sesuai dengan jabatannya dan keahlian tersebut diperoleh berdasarkan riwayat pendidikan dan pelatihan yang telah diberikan. Dengan begitu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah tidak kesulitan dalam hal teknis karena staf yang dimiliki merupakan staf yang sudah tahu apa yang perlu dikerjakan dalam pengelolaan sampah di Kota Banjarbaru.

3. Memiliki Struktur Organisasi yang sesuai dengan Peraturan Walikota Kota Banjarbaru Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

Struktur organisasi yang sesuai dengan aturan akan mempermudah kegiatan pengelolaan sampah karena dengan adanya struktur organisasi tentunya masing masing tanggung jawab memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas dan tepat sasaran. Hal tersebut tentunya menjadi salah satu faktor pendukung implementasi kebijakan pengelolaan sampah karena dapat memanfaatkan waktu dan dapat menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

3.6 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

1. Kurangnya kesadaran dan dukungan masyarakat mengenai kebijakan pengelolaan sampah

Kesadaran dan dukungan masyarakat tentunya sangat berpengaruh dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Jika masyarakat tidak memiliki kesadaran maka tidak akan adanya suatu dukungan yang dapat memaksimalkan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

2. Kurangnya Jumlah Tenaga Kerja Lapangan Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru masih membutuhkan sejumlah 650 orang untuk melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah yang saat ini hanya memiliki 470 orang. Jika tenaga persampahan kurang akan mengakibatkan tidak maksimalnya pengelolaan sampah kemudian kebijakan pengelolaan sampah tidak berjalan dengan semestinya karena tidak dapat melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan serta pemanfaatan dengan baik. Oleh karena itu, jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan produksi sampah menghambat bagi keberlangsungan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

3. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru masih tergolong kurang ditandai dengan armada yang masih kurang, jumlah TPS, PDU yang masih kurang sehingga hal ini menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

3.7 Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru

1. Melakukan Sosialisasi Mengenai Pengelolaan Sampah yang Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan dan Pengelolaan Persampahan /Kebersihan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan melalui observasi, Dinas Lingkungan Hidup telah memasang baliho mengenai ajakan untuk membuang sampah dan mengelola sampah dengan baik. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru telah berupaya dalam membuat video mengenai sosialisasi pengelolaan sampah dengan harapan video tersebut dapat tersebar luas dan mudah dipahami masyarakat.

2. Mengusulkan Menambah Jumlah Tenaga Kerja Persampahan

Dinas Lingkungan Hidup berupaya dalam rekrutmen anggota baru petugas persampahan di lapangan agar sesuai dengan kebutuhan yang perlu dipenuhi dan tentunya disesuaikan dengan

anggaran yang harus diikuti, penambahan ini juga dimaksudkan untuk memkasimalkan daerah daerah yang belum terjangkau.

3. Meminta Bantuan Sarana dan Prasarana

Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru meminta bantuan kepada pemerintah pusat dikarenakan permasalahan sampah merupakan permasalahan nasional. Bantuan pembangunan TPS3R oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ialah hasil dari upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah. TPS3R dibangun agar pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan cepat, tepat dan maksimal.

3.8 Diskusi Temuan Penelitian

Implementasi kebijakan pengelolaan sampah merupakan kegiatan untuk memelihara lingkungan dan akan selalu berdampingan dengan aktivitas manusia. Penulis menemukan temuan penting ialah tidak sepenuhnya masyarakat mendukung kegiatan pengelolaan sampah kemudian permasalahan pengelolaan sampah utamanya terletak pada sarana dan prasarana dimana hal tersebut tidak bisa langsung diwujudkan oleh pemerintah.

Sama halnya dengan temuan Mutiara Dian Prasasti, bahwa pengelolaan sampah terhambat oleh kesadaran masyarakat dan kurangnya sarana dan prasarana (Prasasti, 2018). Berbeda halnya dengan temuan Tri Yudiarto dkk bahwa pengelolaan sampah sudah berjalan baik dengan berpedoman pada kebijakan dan meningkatnya kepuasan masyarakat (Tri Yudiarto dkk, 2021).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru belum berjalan secara maksimal berdasarkan indikator yang digunakan oleh penulis bahwa komunikasi yang dilakukan belum berjalan dengan baik ditandai masih adanya masyarakat yang belum mengetahui kemudian kurangnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Selain itu, masih kurangnya sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah serta kurangnya dukungan masyarakat dalam mendukung aktivitas pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dimana peneliti belum bisa melakukan observasi secara langsung mengenai pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dikarenakan belum mendapatkan akses ke TPA.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru untuk menemukan hasil mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarbaru yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Maryana, Cecep.S, and Erlan.S.2021. *“Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran”*. Jurnal Universitas Galuh Volume 02 Nomor 01 Maret 2022. Ciamis: Universitas Galuh
- Prasasti, M. D. 2022. *“Implementasi Strategi Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Bondowoso”*. Jember: Universitas Muhammadiyah Jember
- Padillah, I. 2021. *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Dinas Lingkungan Hidup Koordinator Wilayah VI Jampangkulon Kabupaten Sukabumi”*. Bandung: UIN Gunung Djati
- Arisandi, Ratna, Hery.N, and Nursahidin. 2019. *“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon”*. Jurnal Publika Volume 07 Nomor 02 Juni 2022. Cirebon: Publika Unswagati
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tangkilisan, H. N. S. 2016. *Implementasi Kebijakan Transformasi Pikiran George Edward*. Yogyakarta: Lukman Offse
- Yudianto, Tri, Prabang.S, and I Gusti Ayu Ketut Rachmi.H. 2021. *“Implementasi dan Strategi dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Blora”*. Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Volume 20 Nomor 01 2021. Semarang: Universitas Diponegoro